

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berakhirnya Perang Dingin yaitu pada tahun 1991, masyarakat dunia banyak berharap era peperangan yang sebelumnya didominasi oleh bias persaingan dua kekuatan besar di dunia ini akan segera berakhir, dan sebuah tatanan dunia yang damai akan segera terwujud. Menilik rentang waktu antara tahun 1989-1991 jelas merupakan bagian dari rangkaian peristiwa dramatis yang mengakhiri pemerintahan komunis di Eropa dan dengan demikian membawa kepada sebuah kesimpulan bahwa Perang Dingin antara Uni Soviet dan negara-negara Barat telah mendominasi politik internasional selama hampir setengah abad (Roberts, 2009). Tepatnya pada musim panas tahun 1990, semua bekas pemerintahan rezim komunis di Eropa Timur telah digantikan oleh pemerintahan yang sah secara demokratis (Historian, 2017). Sebagai contoh di Polandia, Hungaria, Jerman Timur dan Cekoslovakia, partai-sayap kanan yang baru dibentuk telah mengambil alih kekuasaan untuk pertama kalinya semenjak berakhirnya Perang Dunia II (Alon & Jaffe, 2016). Adapun peristiwa runtuhnya Perang Dingin mengisahkan momen yang menggembirakan pada kedua sisi pandangan politik yang berbeda. Bagi masyarakat Eropa Timur, itu berarti kemakmuran ekonomi dan pluralisme politik (Doder, 1993).

Di luar hal tersebut, berakhirnya Perang Dingin menisbahkan fenomena besar yang terkait dengan keamanan kawasan seperti konflik etnis, perbatasan, dan juga perjuangan hak tentang penentuan nasib sendiri (*right to self-determination*) (Pace, 2004). Tepatnya pada tahun 1993, dua tahun setelah Perang Dingin berakhir terdapat setidaknya dua puluh peperangan yang masih berlangsung di berbagai penjuru dunia (Onwar, 2018). Salah satunya terjadi di kawasan Eropa bagian timur. Meningkatnya kekerasan etnis ini merupakan kejadian yang paling kontras pasca runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin. Penjelasan rasional untuk permasalahan ini bermula dari produk sejarah kekerasan etnis yang terjadi di masa lalu, kebencian etnis primordial yang dulunya selalu “ditekan” di era komunis

(Fearon, 2016). Adapun peperangan tersebut lebih didominasi oleh konflik (perlawanan) etnis sehingga berimplikasi terhadap disintegrasi negara dan kesadaran regional (Nurhayati & Santosa, 2001). Sebagaimana yang dikatakan Hurrell di dalam (Sylvia & Sudirman, 2010) bahwa kesadaran regional diartikan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan *other* (hal atau pihak lain yang berasal dari luar komunitas tersebut) yang sifatnya eksternal terutama menyangkut masalah ancaman keamanan.

Perang etnis yang menyertai disintegrasi Republik Federal Sosialis Yugoslavia (SFRY) misalnya, merupakan salah satu konflik yang mengerikan setelah berakhirnya Perang Dingin. Setidaknya pada tahun 1990, Yugoslavia merupakan sebuah negara federasi yang terdiri dari Slovenia, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Montenegro, dan Serbia (Dyrstad, 2012). Proses disintegrasi Yugoslavia menyebabkan kompleksitas permasalahan di kawasan Balkan yang tiada akhirnya. Faktanya konflik tersebut justru mencerminkan proses perubahan di dalam sistem konstitusi internasional secara keseluruhan (Weller, 2000). Hal tersebut didukung dengan adanya interaksi dan pola keamanan aktor-aktor lokal bekas negara Yugoslavia yang hingga kini masih terhubung satu sama lain, ditambah besarnya kekuatan aktor tersebut sehingga menyebabkan kawasan Balkan dengan mudahnya ditarik sebagai sub-regional ke dalam Eropa (Buzan & Waeber, 2003). Inilah barangkali yang kemudian dipahami Barry Buzan sebagai fenomena keamanan kawasan. Dalam bukunya *People, States and Fear* nampak jelas bahwa yang disebut keamanan (*security*) merupakan sebuah fenomena yang memiliki keterkaitan satu sama lain (Buzan, 1991).

Dalam konteks kaitannya dengan fenomena tersebut penulis meyakini bahwa konflik Kosovo sebagai studi kasus yang sempurna untuk menggambarkan kompleksitas keamanan di kawasan. Mengingat Kosovo memainkan peranan penting selama hampir dua dekade terakhir di dalam permasalahan Yugoslavia pada abad ke-20 (Rogel, 2003). Di seberang lain, konflik Kosovo diandaikan sebagai arena yang begitu relevan dengan adanya empat konstelasi keamanan, diantaranya adalah kerentanan negara-negara yang berada di dalam kawasan dalam negeri, hubungan negara ke negara, interaksi wilayah dengan daerah-daerah

tetangga, dan peran kekuatan besar di dalam kawasan (Pop, 2013). Begitu pula secara internal, aktor-aktor yang terlibat mewakili identitas kelompok baik suku, daerah, dan politik.

Konflik Kosovo bermula pada tahun 1989 ketika Presiden Republik Sosialis Yugoslavia yang baru saja terpilih, Slobodan Milosevic, mengisyaratkan niatnya untuk kembali menegaskan dominasi Serbia di dalam federasi yaitu dengan mencabut status otonomi Kosovo dan Vojvodina (Feffer, 2014). Kehadiran nasionalisme Serbia dimanfaatkan oleh Milosevic untuk memperkuat posisi politiknya di Serbia (Letawski & Smith, 2003). Akibatnya lebih dari 100,000 orang Albania terpaksa kehilangan pekerjaannya, hak-hak mereka dicabut salah satunya dengan menutup lembaga pendidikan dan menutup lapangan pekerjaan yang isinya adalah orang-orang Albania (Bekaj, 2010). Kebijakan yang menindas ini kemudian memperkuat dinamika separatisme di Slovenia, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, dan Makedonia, yang akhirnya mengarah kepada disintegrasi Yugoslavia (Cherifi & Gromes, 2015). Sementara itu hingga tahun 1990, Serbia melanjutkan langkah-langkahnya untuk menghilangkan status tersebut secara berkala (Woehrel, 2018). Sebagai respon, di tahun yang sama yaitu pada bulan Juli tahun 1990, delegasi Albania dari Parlemen Kosovo mendeklarasikan Kosovo sebagai sebuah “etinitas yang independen dan setara di dalam struktur Federasi Yugoslavia dan merupakan subjek yang setara dengan hukum-hukum di negara Yugoslavia” (Abazi, 2008). Hal ini kemudian ditentang begitu keras oleh pemerintah Serbia, Kosovo justru dijadikan *Police State* yang dijalankan dan dikontrol oleh Beograd. Kehadiran militer Serbia yang kuat dijadikan alat justifikasi untuk mencegah kelompok yang dianggap sebagai “separatis” Albania (HRW, 2016).

Keadaan yang semakin tidak terkontrol dan dipenuhi oleh kekerasan ini kemudian menimbulkan beragam permasalahan yang semakin kompleks, hingga pada akhirnya muncul dorongan untuk membentuk militansi Albania-Kosovo dalam bentuk paramiliter. Pada tahun 1992 kemudian muncul sebuah gerakan *Albanian Shadow Government* yang tergabung dalam *Kosovo Liberation Army* (Delaney, 2000). KLA pertama kali muncul di permukaan pada tahun 1993, namun mulai mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah Serbia baru di tahun 1996

(Freedman, 2000). KLA memiliki potensi besar di dalam menjaring dan mencari pendukung yang siap bergabung dengan pasukan perjuangan bersenjata, sebagaimana yang dilaporkan CIA di tahun 1996-1997 bahwa pasukan pembebasan ini dapat memobilisasi pendukung yang jumlahnya mencapai puluhan ribu hanya dalam waktu dua hingga tiga tahun (Koktsidis & Dam, 2008). Sementara itu pada bulan Februari 1998, konflik tersebut mengalami eskalasi, akibat bentrokan antara unit Kementerian Dalam Negeri Serbia, Republik Federal Yugoslavia, dan KLA (RAND Corporation, 2006). Karena kekuatan yang tidak sebanding, ditambah kekuatan militer Serbia merupakan pewaris angkatan bersenjata Yugoslavia yang begitu terlatih sehingga dapat mendesak KLA, hal ini kemudian berimbas kepada penduduk Kosovo yang terancam jiwanya dan ada kemungkinan genosida bisa terjadi lagi, seperti genosida di Srebrenica atas orang-orang Bosnia (Muhammad, 2015). Tercatat konflik tersebut mengakibatkan ribuan orang tewas, kerusakan fisik seperti penghancuran properti dan infrastruktur, diperkirakan 250.000 orang Albania Kosovo kehilangan tempat tinggal; kira-kira seperlima dari mereka kehilangan tempat berlindung (U.S. Government Printing Office , 2003).

Ketika serangan dan tekanan yang diberikan oleh militer Serbia masih berlanjut, rupanya tekanan internasional terhadap Milosevic juga turut meningkat hingga akhir tahun 1998. Masyarakat internasional meminta kepada kedua belah pihak untuk melakukan gencatan senjata melalui resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1160 (Overview of Security Council Resolution, 1998). Hadirnya institusi semacam Dewan Keamanan PBB pada tanggal 12 Oktober 1998 merupakan sebuah terobosan untuk mengatasi konflik antara kelompok KLA dan pasukan militer pemerintah Serbia di Kosovo yang berpenduduk etnis Albania (BBC, Kosovo clashes 'ethnic cleansing', 2014). Kini keputusannya adalah untuk memastikan kemajuan menuju solusi diplomatik agar tetap terjaga, dimana para menteri pertahanan NATO di waktu yang bersamaan, mengultimatum Beograd untuk menghentikan tindakan kekerasan terhadap Albania-Kosovo selama empat hari, yang kemudian diperpanjang menjadi sepuluh hari (Youngs, 1998). Meski demikian Milosevic menolak untuk mematuhi, justru perundingan damai di Kosovo berakhir dengan penolakan pemerintah Beograd terhadap kesepakatan

perdamaian di *Rambouillet*, Paris (Black, 2000). Konferensi perdamaian tersebut berisikan kesepakatan damai antara pihak tentara Serbia dengan sebuah delegasi yang akan menjadi perwakilan untuk KLA maupun penduduk Albania-Kosovo. Penolakan ini semakin jelas menunjukkan bahwa rekomendasi, solusi, dan peran institusi luar seperti Uni Eropa (UE), NATO, beserta organisasi kemanan dan kerjasama di Eropa (OSCE) telah diabaikan oleh otoritas Beograd (Zunes, 2014). Setelah perundingan damai gagal, NATO melancarkan serangkaian serangan udara terhadap militer Serbia pada tanggal 24 Maret 1999 (Chossudovsky, 2014). Hal itu dilakukan sebagai tanggapan terhadap pasukan Yugoslavia dan Serbia yang mengusir semua etnis Albania Kosovo, menggusur ribuan orang ke Albania, Makedonia, dan Montenegro (Commons History, 2017).

Setelah 11 minggu pengeboman NATO atas Yugoslavia, Milosevic dengan terpaksa menarik pasukan militer dan polisinya, sekitar 750,000 pengungsi Albania dapat kembali ke tempat tinggal dan sekitar 100,000 Serbia atau separuh dari populasi di provinsi tersebut melarikan diri karena takut akan adanya pembalasan (Tweedie, 2010). Pasca pemukulan mundur pasukan Serbia oleh tentara NATO, pada tanggal 9 Juni 1999 Dewan Keamanan PBB memberikan wewenang kepada setidaknya 50,000 pasukan Kosovo KFOR (*The Kosovo Force*) yang dipimpin langsung oleh NATO untuk mendirikan *United Nations Interim Administration Mission in Kosovo* atau disingkat menjadi UNMIK (Beqiri, 2013). Selama beberapa tahun ke depan UNMIK dan KFOR telah melakukan upaya luar biasa di dalam mempertahankan hukum dan ketertiban dengan membangun peradilan multi-etnis dan lembaga kepolisian setempat, KSP (*Kosovo Police Service*) (Gross, 2017). Berdirinya UNMIK dipengaruhi secara kuat oleh adanya resolusi 1244 oleh PBB, yang mana tujuannya untuk memelihara keamanan dan perdamaian internasional (UN, 1999). Semenjak itu provinsi Kosovo berada di bawah UNMIK, namun dari pihak UNMIK sendiri mengharapkan posisi tersebut segera digantikan oleh ketentuan hukum dari EUROPOL dan Misi Hukum di Uni Eropa (EULEX). Singkatnya, gagasan Dewan Eropa untuk meluncurkan EULEX baru diwujudkan pada bulan Desember 2007, sebagaimana yang tertuang di dalam *Ahtisaari Plan* bahwa Uni Eropa akan menunjuk *Special Representative* (EUSR) untuk

mempersatukan keterlibatan internasional terhadap kemerdekaan Kosovo dibawah pengawasan (Yabanci, 2009). Misi Uni Eropa ini disetujui pada tanggal 4 Februari 2008 kemudian menyatakan bahwa terdapat 2,000 pejabat internasional dan didukung setidaknya 1,100 lokal staf yang akan membantu memisahkan Kosovo atas Serbia hingga mencapai kemerdekaan penuh (BBC, 2008).

Pada akhirnya di tanggal 17 February 2008, Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya dengan konstitusi Republik Kosovo secara unilateral (ICJ, 2010). Ketika Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan untuk kedua kalinya, kejadian tersebut menandai episode terbaru dalam pembubaran Yugoslavia. Tidak seperti apa yang terjadi pada tahun 1991, negara Kosovo yang baru dibentuk segera diakui oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Italia, Turki dan negara Uni Eropa lainnya (Paul, 2008). Meski demikian, kemerdekaan Kosovo bukan tanpa pertentangan. Di seberang lain, ketika Uni Eropa dan Amerika Serikat mengusahakan kedaulatan Kosovo secara *de jure* di bawah *Ahtisaari Plan*, Russia menegaskan bahwa tidak ada keputusan yang dapat diambil tanpa persetujuan Serbia (Holbrooke, 2007). Selain itu Russia bersikeras menyatakan bahwa permasalahan Kosovo akan menciptakan konsekuensi antara Eurasia dan dunia sebagai preseden di masa yang akan mendatang (Antonenko, 2008). Hal tersebut yang kemudian meredefinisi aspek hubungan keamanan antara NATO - Uni Eropa, NATO – Russia, dan yang paling signifikan hubungan Uni Eropa dan Russia. Perbedaan-perbedaan ini telah mengungkap perpecahan lama yang terjadi antara Russia dan Barat, khususnya selama pengeboman NATO terhadap Yugoslavia di tahun 1999. Sementara bagi pandangan Barat, hal ini akan menjadi sulit untuk mencapai kompromi dengan Russia yang semakin tegas dan percaya diri untuk menentang kebijakan Barat.

Studi kemanan di kawasan Balkan sendiri sangat dipengaruhi oleh sejarah, Eropa telah mengalami perubahan struktural yang cukup menentukan kedepannya. Dalam pelbagai periode, benua ini telah mencoba sebagian besar bentuk yang bisa diambil oleh suatu kawasan: terpusat, terfragmentasi, *overlay*, dan dirinya *overlayer* bagi sebagian besar dunia. Selain itu, telah melalui proses penggabungan dan rediferenisasi menjadi beberapa *regional security complex*. Selama Perang Dingin, Uni Soviet telah naik ke tingkat global menjadi konstitusional dunia.

Dengan demikian, Rusia ditarik keluar dari Eropa, dan tidak memiliki *regional security complex* di kawasannya (karena dominasi langsung dari anggota potensial). Setelah berakhirnya Perang Dingin, Eropa telah goyah antar formasi satu, dua, atau bahkan 3 kompleks. Pada tahun-tahun pertama pasca Perang Dingin, 'OSCE' Eropa mulai terbentuk termasuk Rusia sebagai anggotanya. Akan tetapi, kemudian, semakin melayang untuk menjadi pusat RSC-nya sendiri. Kawasan Balkan untuk sementara, seolah-olah membentuk RSC yang berbeda. Perkembangan ini akhirnya tidak terwujud, dan Eropa sekarang terdiri dari dua RSC terpusat yang telah secara tegas menahan gesekan dan keseimbangan kekuatan tradisionalnya (Crombois, 2008). Kedekatan geografis dari dua kekuatan besar Eropa (UE dan Rusia) membuat penyatuan kembali kedua kompleks itu. Hal ini menjadi penting karena lansekap/dinamika keamanan Eropa menjadi khas. Monopoli dekat negara pada status keamanan dan tindakan keamanan ditantang di Eropa. Di mana terdapat banyak objek referensi dari nilai-nilai politik yang kemudian ditindaklanjuti dalam mode keamanan. Munculnya dinamika-dinamika baru dalam studi kewanan di Balkan didorong karena unit analisis studi ini mengalami perubahan mendasar dalam interdependensi dunia ini. Unit analisa yang sebelumnya kurang menekankan perhatiannya terhadap "fenomena besar" terkait keamanan di kawasan ini mulai saling menggugat (Winn, 2003). Hubungan ini ditandai dengan perbedaan kebijakan dalam konteks keamanan di kawasan Balkan. Hadirnya penggabungan antara dua kompleks dapat dibayangkan, baik melalui peningkatan ketegangan dan dengan demikian (dalam) interdependensi kewanan. Dengan demikian skripsi ini akan membahas tentang warisan bersejarah, mitos, dan kekhawatiran tentang preseden dan kepentingan lain yang mana memandu perbedaan kebijakan Russia dan Uni Eropa di dalam merespon status kemerdekaan Kosovo.

B. Rumusan Masalah

Mengapa terjadi perbedaan sikap Uni Eropa dan Rusia dalam merespon kemerdekaan Kosovo tahun 2008?

C. Landasan Teori

Regional Security Complex

Barry Buzan berpendapat (1991) bahwa keamanan pada dasarnya adalah suatu fenomena yang relasional (*relational phenomenon*) (Stone, 2014). Oleh sebab itu, keamanan suatu negara atau beberapa negara dalam suatu kawasan tidak dapat dipahami tanpa lebih dulu memahami pola hubungan saling ketergantungan keamanan, di antara negara-negara kawasan tersebut. Dalam buku *People, States and Fear* edisi ke-2 misalnya, dalam memahami keamananan regional ini, Buzan menawarkan konsep *Security Complex*. Buzan mendefinisikan *Security Complex* sebagai:

“a group of states whose primary security concern link together sufficiently closely that their national security cannot realistically be considered apart from one another” (Buzan, 1991)

Konsep tersebut mencakup aspek persaingan maupun kerja sama diantara negara-negara terkait. Karakter *security complex* yang mencakup *“interdependence of rivalry as well as that of shared interest”* oleh Buzan diistilahkan dengan *“pattern of amity and enmity among states.”* *Amity* adalah hubungan antarnegara yang terjalin mulai dari rasa persahabatan sampai ekspektasi akan mendapatkan dukungan atau perlindungan satu sama lain. Sementara itu, Buzan menggambarkan *enmity* sebagai suatu hubungan antarnegara yang terjalin atas dasar kecurigaan dan rasa takut satu sama lain. *Pattern of amity/enmity* ini dapat muncul dan berkembang akibat berbagai isu yang tidak dapat dipahami hanya dengan melihat *distribution of power* yang ada di antara negara-negara terkait. *Pattern of amity/ enmity* dapat datang dari berbagai hal yang bersifat spesifik seperti sengketa perbatasan, kepentingan yang berkaitan dengan garis etnis tertentu, pengelompokan ideologi dan preseden historis lama baik yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif, serta distribusi kekuasaan di antara negara-negara atau di kawasan tertentu (Buzan, 1991).

Reaksi Uni Eropa dan Russia sehubungan dengan sebelum dan pasca kemerdekaan Kosovo telah menghasilkan sejumlah interaksi kekuatan besar dalam dua kompleksitas keamanan wilayah yang terpisah namun berdampingan, yaitu EU-Eropa-RSC dan Post-Soviet-RSC. Hal ini dikarenakan proyeksi 2 (dua) kekuatan besar di wilayah yang berdekatan, yaitu UE dan Russia, sehingga menghasilkan dinamika keamanan antardaerah, yang merupakan indikasi untuk memperkuat keberlangsungan super-kompleksitas di keseluruhan Eropa. Dalam variabel *amity-enmity* penulis akan menganalisis pola hubungan antara EU dan Russia. Analisis konstruktivis holistik akan sangat ditekankan, dengan menganalisis persepsi negara, faktor sejarah, interaksionalisme simbolik dan lain-lain. Pada akhirnya, penulis akan berusaha menilai pola *amity-enmity* seperti apakah yang terjadi di kompleks keamanan EU dan Russia.

D. Argumen Penelitian

- Dengan menggunakan metode analisa *regional security complex*, penulis ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan Kosovo memiliki pengaruh di dalam pembentukan arsitektur keamanan regional di Eropa. Interdependensi keamanan di kawasan Balkan dan Kaukasus (sebagai bagian dari Eropa) didasarkan oleh adanya distribusi power oleh negara-negara yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut.
- Dengan menggunakan salah satu variabel *the pattern of amity and enmity*, penulis ingin menunjukkan bahwa perbenturan aspek *amity* dan *enmity* ini menjadi faktor penting yang menyebabkan perbedaan sikap dan perilaku kebijakan luar negeri Uni Eropa dan Russia, yang pada akhirnya memengaruhi dinamika hubungan keduanya dari waktu ke waktu. *The pattern of amity and enmity* antara kedua negara lebih diwarnai dan didominasi oleh aspek *enmity* (permusuhan) ketimbang aspek *amity* (kerja sama). Rusia yang tidak mendukung kemerdekaan Kosovo didasarkan pada kebijakan luar negerinya untuk mendapatkan peranannya kembali, yaitu dominasi dan eksklusifitas di negara kawasan Balkan, pasca runtuhnya Uni Soviet. Sementara bagi pandangan Uni

Eropa, mendukung kemerdekaan Kosovo didasarkan pada dampak keamanan bagi Uni Eropa dan kebijakan integrasi terkait transformasi konflik perbatasan antara Kosovo dan Serbia. Sehingga hal itu akan dapat membuka jalan kebijakan perluasan Uni Eropa terhadap kawasan Balkan.

E. Tujuan Penulisan

1. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan karakter *security complex* atau *the pattern of amity and enmity* antara Uni Eropa dan Russia.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep *amity-enmity* sebagai instrumen untuk memahami fenomena hubungan Uni Eropa dan Russia.
3. Tulisan ini bertujuan untuk mengimplementasikan teori hubungan internasional ke dalam fenomena kompleks keamanan di semenanjung Balkan terhadap peristiwa deklarasi kemerdekaan Kosovo.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian pada karya tulis ini adalah pengaruh pola *security complex* di kawasan terhadap terciptanya *amity-dan enmity*, serta penerapan variabel *amity-enmity* dalam menganalisa dinamika hubungan Russia dan Uni Eropa. Kemudian pengaruh *pattern of amity and enmity* yang menentukan sikap dan perilaku di dalam pembentukan kebijakan luar negeri Russia dan Uni Eropa dalam merespon kemerdekaan Kosovo. Mengacu pada jangkauan penelitian tersebut, penulis membatasi tahun penelitian yaitu pada tahun 1998 hingga tahun 2008.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menulis karya tulis ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang memiliki paradigma fenomenologi, sehingga proses penelitiannya lebih menekankan pada analisa fenomena tertentu, termasuk

fenomena hubungan internasional. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan analisis data sekunder yaitu melalui teknik penelitian kepustakaan (*library research*), publikasi/buku, data mentah (*raw data*) peneliti ilmu hubungan internasional, terutama yang mendalami kajian strategi dan keamanan dan kajian mengenai kawasan Eropa.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempejelas bahasan pada karya tulis ini, maka penulis membagi lima bab bahasan dengan susunan sebagai berikut:

Bab 1 menjelaskan mengenai signifikansi perbandingan Uni Eropa dan Rusia terhadap permasalahan di Balkan dan latar belakang konflik Kosovo hingga munculnya banyak pertentangan dari kawasan sekitar, rumusan masalah, landasan teori, argumen penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang perjalanan konflik di Kosovo, bermula dari ide-ide separatis muncul, pemberian hak istimewa, hingga deklarasi kemerdekaan yang berbuah pada adanya pertentangan bagi kawasan dan mendatangkan aktor-aktor eksternal. Analisa konsep *amity* dan *enmity* akan menjadi pembuka di bab ini, menjelaskan lebih lanjut bagaimana peran kedua aktor eksternal di Konflik Kosovo berdasarkan studi keamanan regional.

Bab III membahas hubungan antara Uni Eropa dan konflik Kosovo, dimana hal ini erat kaitannya dengan kepentingan Uni Eropa dalam menyongsong perluasan integrasi kawasan. Selanjutnya kebijakan-kebijakan dan sikap yang dikeluarkan Uni Eropa di dalam merespon konflik di Kosovo, ini pun akan menjadi bahasa utama guna menelaah sejauh mana dan bagaimana peran Uni Eropa di Kosovo.

Bab IV membahas tentang sikap dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Rusia, sebagai respon dari konflik kemerdekaan Kosovo. Sudut pandang Rusia akan menjadi titik pembahasan utama yang selanjutnya akan menjadi bahan pembandingan bagi respon yang dilakukan aktor lainnya, Uni Eropa.

Bab V berisi rangkuman dari keseluruhan bab yang disusun dalam bentuk kesimpulan dan menjadi penutup dalam karya tulis ini.